ABSTRAK

Seiring dengan hadirnya desentralisasi, kebijakan pengupahan yang semula adalah otoritas pusat, kini menjadi kewenangan daerah yang tercantum dalam peraturan gubernur. Berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini, menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Masing-masing pihak berupaya untuk memberikan solusi yang paling rasional agar dapat melahirkan solusi yang integratif.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kepentingan dalam perpektif *bounded rationality* kemudian memetakan konflik yang terjadi diantara ketiganya Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara *purposive*. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisa data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Kemudian validitas data diuji melalui traingulasi data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bounded rationlity* terlihat dari adanya kepuasan yang berbeda (*satisficing*) terhadap kehadiran sebuah kebijakan, ketidaklengkapan pengetahuan yang membatasi sebuah rasionalitas, serta nilai-nilai birokrasi yang membatasi perilaku birokrat. Selain itu, konflik kepentingan yang terjadi dalam perumusan kebijakan UMK Gresik ini merupakan konflik yang dianalisa menggunakan *conflict pattern analisys* dengan situasi konflik menang-kalah. Pada akhirnya dari konflik ini dapat mengetahui berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing *stakeholder* serta potensi konflik dan koalisi yang terjadi diantara ketiganya.

Kata Kunci : konflik kepentigan, *bounded rationality*, *stakeholder*, kepentingan masing-masing pihak